KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kementerian PUPR Diapresiasi Senayan
Tanggal : Sabtu, 24 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Perbaiki Jalan Daerah

Kementerian PUPR Diapresiasi Senayan

ANGGOTA Komisi V DPR Hamid Noor Yasin mengapresiasi rencana perbaikan jalan daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, diambil alih Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rencana perbaikan jalan daerah tahap pertama itu ditargetkan dilakukan Juli 2023 dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 14,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani perbaikan jalan di 32 provinsi pada 573 ruas jalan dengan total panjang 2.873 kilometer (km).

"Ada beberapa provinsi prioritas, antara lain Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten," kata Hamid.

Selain itu, lanjut Hamid, ada pula penanganan jembatan sepanjang 2.363 meter. Sedangkan tahap kedua menggunakan sisa anggaran Rp 18,1 triliun, sehingga total Rp 32,7 triliun digelontorkan Pemerintah Pusat tahun ini untuk memperbaiki jalan-jalan daerah.

Dia bilang, kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Inpres ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4). Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi dan kabupaten/kota.

"Jadi, di balik Inpres itu ada peran penting Komisi V DPR yang merumuskan Undang-Undang di atas bersama Pemerintah. Peran ini juga ditegaskan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja (Raker) pada 7 Juni 2023," jelas anggota Fraksi PKS ini.

Meski demikian, Hamid mengingatkan, Inpres Nomor 3/2023 tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas jalan daerah. Manfaatnya besar dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi. Hal itu sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, menurut Hamid, Pemerintah telah menetapkan sembilan sasaran/indikator peningkatan konektivitas wilayah.

Dari kesembilan sasaran tersebut, kemantapan jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada 2024, persentase kondisi mantap jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara berurutan ditargetkan sebesar 95 persen, 74 persen, dan 64 persen. Pencapaian target tersebut tentunya harus mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.

Menurutnya, perkembangan kondisi kemantapan jalan nasional dan provinsi menunjukkan tren peningkatan. Yakni meningkat dari 91 persen dan 68 persen pada tahun 2020 menjadi 92 persen dan 72 persen pada tahun 2022.

"Sayangnya, kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota malah menunjukkan penurunan, dari 67 persen tahun 2021 menjadi 60 persen tahun 2022," ungkapnya. ■ KAL